

**Muradi**

**TNI  
DAN  
POLITIK  
KEAMANAN**

Dian Cipta  
September, 2015



# TNI DAN POLITIK KEAMANAN

**Muradi**

Desain & Tata Letak:  
Tim Dian Cipta

Diterbitkan oleh:  
Penerbit Dian Cipta  
Jl. Mayang Cinde No.13 Bandung  
Tlp. 022-7801169 SMS/WA: 0896.5631.5041  
Email: [redaksi@diancipta.com](mailto:redaksi@diancipta.com)  
Website: [www.diancipta.com](http://www.diancipta.com)

Cetakan Pertama:  
September 2015

Ukuran:  
14,5 cm X 21 cm

ISBN:  
978-602-72419-2-3

UU No.19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta  
Hak cipta dilindungi oleh undang-undang.  
Dilarang mengutip atau memperbanyak sebagian atau isi seluruh buku ini  
tanpa izin tertulis dari penerbit.

# PENGANTAR PENULIS

Militer dalam politik ditandai dengan agresifitas untuk mengontrol setiap sendi negara dan aktivitas warga negaranya. Keberadaan militer dalam politik meredup dan hilang seiring dengan menguatnya demokrasi dan tata kelola pemerintahan yang baik. Namun demikian, politik militer tetap memiliki ruang dalam sistem demokrasi sebagai politik kenegaraan. Politik kenegaraan diartikan sebagai ruang politik yang diberikan kepada tentara untuk tetap berkontribusi dalam menjaga agar eksistensi suatu negara tetap lestari. Pada derajat tertentu, bahkan untuk menjaga agar eksistensi negaranya, tak jarang langkah yang berlawanan dengan demokrasi kerap juga dilakukan untuk sekedar menginterupsi, lalu mengembalikannya pada otoritas politik sipil.

Buku ini menggambarkan sisi yang sesungguhnya menjadi keidealan suatu organisasi militer, di mana organisasi ketentaraan secara aktif menantang praktik demokrasi dengan paradigmatik kenegaraan yang dapat dipertanggungjawabkan. Keterlibatan TNI dalam politik keamanan tergambar sepenuhnya untuk penguatan politik demokrasi. Kegelisahan atas praktik demokrasi yang dirasakan, kemudian terhapus oleh komitmen TNI mengantarkan Indonesia menjadi negara demokratis. Pada konteks ini, instrumen keamanan nasional, dalam hal ini salah satunya TNI menjadi garda terdepan dalam memastikan keindonesiaan yang satu. Kepatuhan atas kebijakan politik yang dibuat oleh otoritas sipil sesungguhnya menegaskan posisi TNI dalam radar hubungan sipil-militer yang baik. Kontrol sipil obyektif menegaskan bahwa TNI secara kelembagaan terus berupaya menjadi tentara profesional.

Karenanya, keberlangsungan politik militer dalam politik kenegaraan ditandai dengan komitmen untuk merawat demokrasi dan otoritas sipil yang dihasilkan. Selama hal tersebut terjaga dengan baik, maka sesungguhnya pe-libatan militer dalam politik kenegaraan tidak menjadi ancaman atas praktik demokrasi itu sendiri. Hal tersebut membutuhkan komitmen yang luar biasa dari perwira militer untuk terus menerus memastikan institusinya berjarak dengan politik praktis. Dengan demikian, keberadaan militer dalam politik sejatinya justru menjadi penopang dari demokrasi itu sendiri. Hal ini secara menarik tersaji dalam buku ini.

Buku di tangan Anda ini hanyalah sedikit perspektif untuk memotret eksistensi TNI dalam politik keamanan. Namun sebagai bagian dari penguatan paradigmatik, buku ini dapat menjadi alternatif dalam melihat keterlibatan militer dalam politik.

Penulis mengucapkan terima kasih pada Penerbit Dian Cipta atas diterbitkannya kumpulan tulisan ini menjadi sajian yang enak dibaca. Selain itu ucapan terima kasih juga ditujukan pada kolega penulis di Program Studi Ilmu Pemerintahan FISIP UNPAD, dan juga para peneliti di Pusat Studi Politik dan Keamanan (PSPK) UNPAD atas diskusi yang alot dan konstruktif untuk membumikan ide-idenya dalam tulisan yang tersaji dalam buku ini. Terakhir ucapan terima kasih penulis pada keluarga, isteri tercinta, Alia, dan kedua anak penulis, Gadis dan Ade, atas pengertian dan kerelaannya sehingga ekspresi akademik setidaknya tersaji dalam buku tipis di tangan Anda ini.

Bandung, September 2015

Muradi

# TENTANG PENULIS



MURADI adalah Dosen Sarjana dan Pasca Sarjana Ilmu Politik dan Pemerintahan FISIP Universitas Padjadjaran (UNPAD), Bandung. Aktif juga mengajar di beberapa universitas terkemuka diantara Departemen Hubungan Internasional, Universitas Paramadina, Jakarta dan Program Studi Ilmu Hubungan Internasional, Universitas Jenderal Achmad Yani, Cimahi. Selain itu juga mengajar Program Magister Prodi Peperangan Asimetrik, Diplomasi Pertahanan

dan prodi Strategi Perang Semesta di Universitas Pertahanan Indonesia, Jakarta, serta Program Magister dan Doktoral Ilmu Kepolisian di STIK-PTIK, Jakarta. Mata Kuliah yang diajarkan antara lain: Politik Pertahanan dan Keamanan, Diplomasi Pertahanan & Keamanan, Teori Peperangan, Demokrasi & Diplomasi di Asia Tenggara, Terorisme dan insurgensi, Budaya Kepolisian, Politik dan Kepolisian. Muradi juga adalah mengampuh mata Kuliah Peperangan Modern SESKOAD, SESKOAL, dan juga SESKOAU, yang mana mata kuliah tersebut adalah pelajaran wajib bagi perwira siswa.

Muradi pernah menjadi peneliti dan Direktur Program The RIDEP Institute. Selain sebagai pendiri, ia juga menjadi Direktur Eksekutif Pusat Studi Pertahanan & Perdamaian (PSPP), Universitas Al Azhar Indonesia, Jakarta. Pada Pusat Studi Keamanan Nasional, Universitas Padjadjaran (PSKN UNPAD), dirinya menjabat sebagai Wakil Ketua. Saat ini Muradi Menjadi Ketua Pusat Studi Politik & Keamanan Universitas Padjadjaran (PSPK UNPAD). Menjadi nara sumber dan konsultan ahli baik lokal, nasional maupun internasional berkaitan dengan penegakan hukum dan kepolisian serta

kajian keamanan dan peperangan ireguler di sejumlah lembaga pemerintahan, swasta dan juga organisasi internasional. Muradi juga banyak mengkaji dan menulis tentang keamanan dan politik di berbagai surat kabar, majalah, serta jurnal naik nasional dan internasional. Tengah menyelesaikan tulisan yang akan menjadi salah satu bab pada buku berjudul *Criminologies of the Military* yang disunting oleh Profesor Andrew Goldsmith (Hart/Bloomsbury, UK 2015) dengan Judul: “The Military and Crimes: the TNI Involvement in Criminal Activities in the President Susilo Bambang Yudhoyono Administration (2004-2014)”. Dua tulisan hasil risetnya juga akan dimuat pada *Journal Politics and Laws* (2015) dengan judul: “The Police, the Immigration Office & Illegal Immigrants: The Indonesian’s Cases”, dan “Human Rights and the Police Oversight Model: The Indonesian’s Cases” pada *American International Journal of Contemporary Research* (2015).

Mempelajari Sejarah Politik Jurusan Ilmu Sejarah UNPAD (2000). Selain mempelajari Politik Keamanan dari Program Magister Ilmu Politik (M.Si) FISIP UI (2003), juga memperdalam Kajian Stratejik dan keamanan (MSc) dari S. Rajaratnam School of International Studies (RSIS), Nanyang Technological University (NTU), Singapura (2008) dengan Thesis berjudul: *The Reform of Mobile Brigade of Indonesian National Police and Democratization*. Penulis merampungkan studi Doktorat (Ph.D) Ilmu Politik dan Hubungan Internasional pada *School of Politics and International Studies, Flinders Asia Center, Flinders University, Adelaide, Australia* (2012) dengan Disertasi berjudul: *The Indonesian National Police in Post-Soeharto’s Indonesia: Politicization and Decentralization in the Era of Reformasi, 1998-2008*. Tulisannya yang berjudul ‘The Coordination of Counter-Terrorism in Indonesia’ menjadi salah satu bab dalam Romaniuk, Scott Nicholas (ed) *New Wars: Terrorism and Security of the State*. Pittsburgh: Red Lead Press. 2012. Selain itu buku yang berjudul *The Politics and Governance in Indonesia: The Police in the Era of Reformasi* diterbitkan oleh penerbit terkemuka asal London, Inggris, Routledge pada tahun 2014. Muradi dapat dihubungi melalui pos elektronik: muradi\_clark@unpad.ac.id.

# DAFTAR ISI

Kata Pengantar .....	i
Biodata Penulis .....	iii
Daftar Isi .....	v
Bab I	
PENGADAAN ALUTSISTA DAN KEBIJAKAN POLITIK .....	1
Bab II	
CALON PANGLIMA TNI: ROTASI & SOLIDITAS TNI .....	6
Bab III	
DOKTRIN JOKOWI .....	12
Bab IV	
HARD POWER TO SOFT POWER: HAMBATAN DAN TANTANGAN.....	18
Bab V	
ORGANISASI KOMPONEN CADANGAN MATRA DARAT .....	34
Bab VI	
RUU KAMNAS DAN PEMDA .....	50
Bab VII	
KASAD BARU DAN TANTANGANNYA .....	56
Bab VIII	
MENGELOLA KEDAULATAN NEGARA .....	62

Bab IX	
KEAMANAN NASIONAL DAN	
HAK PUBLIK DALAM MENGAKSES INFORMASI .....	66
Bab X	
RUU KAMNAS DAN PEMDA .....	80
Bab XI	
NETRALITAS AKTOR KEAMANAN	
DALAM PEMILU 2014 .....	86
Bab XII	
NETRALITAS TNI/POLRI PADA PILPRES 2014 .....	90
Bab XIII	
REGENERASI KEPEMIMPINAN TNI .....	94
Bab XIV	
SUTIYOSO DAN	
PROBLEM BADAN INTELIJEN NEGARA .....	98
Bab XV	
TANTANGAN PANGLIMA TNI .....	102
Bab XVI	
TNI-POLRI DAN MASALAHNYA .....	106
Bab XVII	
TENTARA YANG GELISAH .....	110
Bab XVIII	
URGENSI NETRALITAS INSTITUSI KEAMANAN	
PADA PEMILU 2014 .....	114